

DAFTAR ISI

DISERTASI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
INTISARI	xvi
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Keaslian Penelitian.....	27
D. Tujuan Penelitian.....	31
E. Manfaat Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Negara Kesejahteraan (<i>Welfare state</i>)	33
B. Kewenangan Mengatur	39
1. Peraturan Perundang-undangan	44
2. Peraturan Kebijakan (<i>Beleidregel</i>)	51

3. Keputusan	58
4. Perizinan	63
C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	67
1. Sejarah Perkembangan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	76
2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan	82
D. Negara Kesatuan	85
E. Desentralisasi	107
F. Otonomi Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	130
G. Pelayanan Publik	153
BAB III CARA PENELITIAN	162
A. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan.....	162
B. Jenis Data, Alat, dan Cara Memperolehnya	167
C. Konsep-Konsep Pokok dan Batasan Pengertian	175
D. Cara Menganalisis Data	181
E. Jalannya Penelitian dan Hambatan Penelitian.....	182
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGATURAN BIDANG KESEHATAN.....	183
A. Arah Kebijakan Bidang Kesehatan	183
B. Pengaturan Bidang Kesehatan Sebelum dan Setelah Era Otonomi Luas	195
1. Pengaturan Bidang Kesehatan Sebelum Otonomi Luas	199
a. Undang-Undang No 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.....	199
b. Undang-Undang No 22 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah	203

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	227
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	233
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	235
2. Pengaturan Bidang Kesehatan Pada Era Otonomi Luas	252
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah	253
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah	275
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	318
B. Arah Kebijakan Pengaturan Bidang Kesehatan Pada Era Otonomi Luas	343
BAB V PENGATURAN BIDANG KESEHATAN YANG IDEAL	383
A. Realisasi Pengaturan Bidang Kesehatan Pada Era Otonomi Luas dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan	383
1. Realisasi Pengaturan Bidang Kesehatan	384
a. Realisasi Pengaturan Bidang Kesehatan di Kota Jayapura	386
b. Realisasi Pengaturan Bidang Kesehatan di Kota Yogyakarta	403
c. Realisasi Pengaturan Bidang Kesehatan Secara Nasional	432
2. Implikasi Pengaturan Pelayanan Kesehatan Terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat: Sebuah Anomali	452
a. Implikasi Pengaturan Pelayanan Kesehatan Pada Derajat Kesehatan Masyarakat di Kota Jayapura	456
b. Implikasi Pengaturan Pelayanan Kesehatan Pada Derajat Kesehatan Masyarakat Di Kota Yogyakarta	468
c. Implikasi Pengaturan Pelayanan Kesehatan Pada Derajat Kesehatan Masyarakat Secara Nasional	473



B.	Pembentukan Pengaturan Bidang Kesehatan yang Ideal.....	482
1.	Otonomi Luas dan Asimetris	485
2.	Perlu Waktu Transisi yang Cukup Untuk Memastikan Bahwa Pemerintah Daerah Sudah Siap Untuk Melaksanakan Desentralisasi Kesehatan	489
3.	Harus Ada Evaluasi Dari Pemerintah Pusat Terkait Kemampuan Daerah Untuk Melakukan Pengaturan Bidang Kesehatan	492
4.	Pemerintah Harus Menerbitkan Peraturan-Peraturan di Bidang Kesehatan yang Diperlukan Untuk Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan.....	493
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		499
A.	Kesimpulan	499
B.	Saran	502
Daftar Pustaka.....		505